

Terbit online pada laman web jurnal : <http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS>

 Fakultas Sastra Universitas Ekasakti	JURNAL JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)	
	Vol. 8 No. 2 ISSN : 2579-5449 (media cetak)	E-ISSN : 2597-6540 (media online)

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang

¹Purnawati, ^{*2}Fera Mutia

¹Prodi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Adabiah, purnawati@gmail.com

^{*2}Prodi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Adabiah, ferameuthia@gmail.com

**Corresponding Author:*

Fera Mutia

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Adabiah, ferameuthia@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat mengenai data yang tidak sinkron dengan data yang ada di DISCAPIL, ada yang sudah pindah atau meninggal tapi masih terdata untuk menerima bantuan, dan kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait. Dalam penelitian ini ada beberapa pengelompokan dalam mengkaji dalam pengelolaan DTKS di kecamatan Kuranji kota Padang yaitu (1) Bagaimana pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di kecamatan Kuranji kota Padang (2) Apa kendala – kendala yang dihadapi dalam pengelolaan (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang, dan (3) Bagaimana cara mengatasi kendala – kendala dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji Kota Padang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang. Metodologi yang peneliti pakai yaitu dengan pendekatan Kualitatif Analisis Deskriptif, sumber data Primer dan Sekunder. Teknik penentuan sampelnya Perposive Sampling serta menggunakan teknik pengumpulan datanya melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Kendala yang peneliti temukan yaitu perencanaan yang kurang baik dalam pengusulan data, tata kelola pengorganisasian yang kurang baik, lambatnya dalam menetapkan maupun memberikan informasi, dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang. Dalam kendala – kendala yang ada peneliti memberikan pandangan sebagai cara untuk mengatasi kendala – kendala tersebut yaitu menempatkan dan memfasilitasi petugas yang mempunyai keahlian dan kinerja secara professional (Planning), membuat tata kelola pengorganisasian yang jelas dalam menjalankan suatu pekerjaan pada petugas pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Organizing), serta membuat evaluasi kinerja (Actuating) dan pengawasan (Controlling) terhadap pencapaian hasil yang dilakukan oleh petugas – petugas pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang.

Keywords: Pengelolaan, Kendala DTKS di Kecamatan Kuranji Kota Padang, Cara Mengatasi

© 2024 Jurnal JIPS

I INTRODUCTION

Pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan memiliki tanggung jawab diantaranya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Dwi Astuti (2001:194) bahwa pemenuhan hak masyarakat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat. Salah satu tanggung jawab pemerintah ialah tentang pengentasan kemiskinan.

Menurut Djohadikusumo (1995:33) pola kemiskinan ada empat yaitu

1. Pola *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.
2. Pola *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. Pola *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan.
4. Pola *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Dari teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga tindakan pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh, dilihat dari berbagai aspek kehidupan, dibahas secara detil hingga ke lini terkecil dan dilakukan secara sistematis. Pemerintah Pusat maupun daerah telah bekerja sama dalam mengkoordinasi pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia, diantaranya pemerintah telah melakukan beberapa program yaitu program bantuan sosial atau jaminan sosial untuk keluarga tidak mampu yang telah memenuhi syarat yang ada. Pendataan keluarga tidak mampu juga sudah di atur melalui Kementerian/ Lembaga terkait, dalam hal ini melalui Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu, Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Kemensos nomor 5 Tahun 2019. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam peraturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan ketepatan dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk bantuan sosial. Sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diantaranya untuk Penerima Bantuan Sosial seperti Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, Kementerian Sosial memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan data fakir miskin di lingkup nasional, tugas Dinas Sosial Provinsi sebagai pengelolaan data fakir miskin di lingkup provinsi, sedangkan tugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota ialah melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di lingkup Kabupaten/Kota dengan melakukan pemutakhiran data DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data yang berkualitas yaitu data yang akurat, lengkap, relevan, dan real sesuai dilapangan.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal, hal tersebut terungkap bahwa dari 19 Kabupaten/Kota hanya Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Damasraya yang Persentasi pemukhtahiran Data DTKS di atas 50%, ketidakefektifan tersebut disebabkan pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pemutakhiran data masyarakat pada petugas pendataan. Pemutakhiran data merupakan sebuah langkah dalam pembaharuan data menuju data yang berkualitas. Kegiatan pemutakhiran data dilakukan melalui verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota secara berkala.

Dinas Sosial Kota Padang merupakan perangkat daerah kota yang menyelenggarakan

tugas di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Padang, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam hal ini Kota Padang.

Pengelolaan data bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat demi tercapainya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang optimal. Data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran program perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu karena datanya sudah terverifikasi dan validasi mulai dari lingkup terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, Kecamatan, sehingga sasaran program pemerintah terutama bantuan sosial tepat sasaran. Penggunaan DTKS dapat menyortir masyarakat yang diutamakan mendapat bantuan sosial dan yang tidak. Keterandalan data sebagai dasar pemberian bantuan sangat penting. Agar pendataan dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan di lapangan, tetapi tetap dapat merujuk kepada DTKS. Namun pelaksanaan verifikasi dan validasi dilapangan tentulah harus didukung Pemerintah Daerah, baik dana, dan sumber daya manusia yang memadai.

Berdasarkan pusat data informasi (Pusdatin) tahun 2023, penduduk miskin di Kecamatan Kuranji Kota Padang berjumlah 4.868 jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding 2022. Data kemiskinan ini (DTKS) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang telah dilakukan verifikasi dan validasi data tahun 2023, namun didalam data tersebut masih banyak *inclusion error* dan *exclusion error* disebabkan beberapa faktor.

Tabel 1: Data Penduduk yang belum di verifikasi dan validasi data di Kecamatan Kuranji Kota Padang

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Marlan	Kel. Gunuang Sarik	Meinggal
2	Sismiyanti	Kel. Gunuang Sarik	Pindah
3	Abdul	Kel. Gunuang Sarik	Meinggal
4	Siska Harahap	Kel. Ampang	Pindah
5	Agung Putra	Kel. Kalumbuak	Pindah
6	Nurhayati	Kel. Kalumbuak	Meinggal
7	Mardiana	Kel. Kalumbuak	Meinggal
8	Mukhlis	Kel. Kuranji	Meinggal

9	Alwi Said	Kel. Kuranji	Pindah
10	Rayati	Kel. Kuranji	Pindah
11	Delmawati	Kel. Kuranji	Pindah
12	Rustam	Kel. Kuranji	Pindah
13	Mali	Kel. Korong Gadang	Meinggal
14	Zulhari	Kel. Korong Gadang	Pindah
15	Yusmiati	Kel. Korong Gadang	Meinggal

Sumber Data Kendali DTKS 2023

Proses dan tata cara verifikasi dan validasi data dimulai dari tingkat Kelurahan. Aparat Pemerintah Kelurahan Kuranji Kota Padang melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dari keluarga yang tercantum dalam DTKS yang dianggap dan dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada, meninggal dunia, pindah alamat ke luar Kota Padang yang kesemuanya sudah perlu dikeluarkan dari DTKS. Dinas sosial dapat melakukan pendekatan kepada warga Kecamatan atau Kelurahan setempat dengan memberikan informasi mengenai pentingnya dilakukan verifikasi dan validasi data, dan akibat yang ditimbulkan jika data tidak diperbaharui atau diupdate. Selain itu dinas sosial juga dapat menginformasikan tentang edaran Menteri Sosial berkaitan dengan verifikasi dan validasi data.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, di Kecamatan Kuranji Kota Padang sendiri masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam mengelola atau memverivikasi DTKS di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
2. Data yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti NIK, nama, dan alamat para Penerima Keluarga Manfaat (KPM).
3. Ada yang sudah pindah kependudukan, ada yang sudah meninggal.
4. Kurang pengawasan dan sosialisasi berlanjut dari Dinas Sosial sampai ke Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kecamatan Kuranji dan menganalisis apa saja pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan proses verifikasi dan validasi data DTKS di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Mengingat pentingnya pengelolaan DTKS untuk menghasilkan data yang berkualitas, yang valid dan aktual, sehingga penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Maka dalam

penelitian ini mengangkat judul tentang **“Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang”**.

II RESEARCH METHODS

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Menurut Sukmadinata (2005) dasar penelitian Kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim,2002).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami, menganalisis secara mendalam mengenai Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Proses penelitian ini melibatkan upaya penting dalam mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data dari informan, menganalisis data yang sesuai dengan tema yang diterapkan. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif membuat peneliti dapat langsung mengetahui dan bisa memahami kenyataan yang ada di lapangan.

B. Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Tipe penelitian Kualitatif Deskriptif. Yaitu dengan menggambarkan fakta atau realita yang terjadi di lapangan dengan prinsip eksplorasi dan eksplanatori. Yang berarti eksplorasi ialah proses mencari tahu secara mendalam tentang suatu peristiwa yang kemudian dapat menghasilkan data yang jelas dan eksplanatori ialah proses mencari jawaban dan alasan yang menjadi sebab akibat dari terjadinya sebuah peristiwa atau masalah (J.r. Raco.2010:50).

Peneliti berusaha untuk menganalisis dan menggambarkan fakta tentang bagaimana Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang dan menganalisis tentang faktor penghambat dan pendukung yang terjadi dalam proses verifikasi dan validasi data DTKS di Kecamatan Kuranji

Kota Padang.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiono.2019:410) yakni :

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan oleh peneliti dari sumber data. Yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan yang telah dipilih yang akan dicantumkan pada halaman informan penelitian.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari dokumen- dokumen yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti baik itu peraturan, kebijakan, jurnal, catatan, foto, dan dokumentasi dari media sosial. Data sekunder tersebut merupakan laporan histori yang telah diarsipkan baik itu yang dipublikasi maupun tidak dipublikasikan.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan oleh peneliti berdasarkan kriteria bidang yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik itu pelaksana maupun petugas yang mengetahui seluk beluk tentang objek penelitian. pemilihannya berdasarkan *Purposive Sampling*, ialah penentuan sampel dengan mempertimbangkan tugas yang diemban oleh seseorang yang memiliki keterkaitan dan yang mampu menjawab permasalahan penelitian (Sugiono.2019:153). Berikut tabel informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2 : Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Camat Kecamatan Kuranji Kota Padang	1
2	Sekretaris Camat Kuranji Kota Padang	1
3	Kasi Kesos Kecamatan Kuranji Kota Padang	1
4	Operator Pengelola Data Sosial Kecamatan Kuranji Kota Padang	1
5	Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kuranji Kota Padang	1

6	Koordinator program Sembako/ BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Kecamatan Kuranji Kota Padang	1
7	Operator DTKS di seluruh kelurahan Kecamatan Kuranji Kota Padang	9
Jumlah		15

Sumber: Diolah Sendiri

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini menurut J.r.Raco (2010:110-115) ada 3 yaitu :

1) Observasi

Ialah Teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengamati ke lapangan dengan mengidentifikasi sikap, Tindakan, dan interaksi interpersonal. Dalam Teknik ini peneliti akan melihat peristiwa, atau realita masalah secara langsung di tempat. Pengamatan dilakukan secara langsung tapi tidak berperan serta tanpa mediator objek tertentu, hal tersebut untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan oleh informan dalam penelitian.

2) Wawancara

Ialah Teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pendapat, persepsi seseorang tentang suatu peristiwa atau realita. Karena pendapat dan persepsi seseorang dapat dipahami dan dapat dianalisis secara ilmiah. Wawancara dilakukan untuk dapat memperoleh informasi yang tidak diperoleh dalam observasi.

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada informan secara langsung (bentuk wawancara terstruktur). Pada saat memberikan pertanyaan, peneliti menggunakan perekam suara untuk memudahkan pada saat penulisan hasil penelitian. Adapun indikator pengelolaan yang diteliti ialah, pertama bagaimana perencanaan dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi serta penggunaan data. Bagaimana peng-organisasian dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi serta penggunaan data, bagaimana pelaksanaan dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi serta penggunaan data, dan bagaimana evaluasi dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi serta penggunaan data.

3) Dokumentasi

Ialah teknik pengumpulan data berupa material yang tertulis dan tersimpan baik itu dokumen atau literatur. Dalam pengumpulan dokumen dilakukan dengan menggali dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik itu struktur organisasi, Standar Operating Procedure (SOP) di Kecamatan Kuranji Kota Padang, peraturan dan prosedur yang di gunakan, dokumen sejarah Kecamatan Kuranji, dokumen aplikasi SIKS-NG, surat keputusan Camat Kecamatan Kuranji Kota Padang, dokumen mekanisme proses verifikasi dan validasi data, dokumentasi wawancara dan observasi, serta catatan-catatan, foto kegiatan- kegiatan yang pernah dilakukan oleh Kecamatan Kuranji Kota Padang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses penyajian data yaitu dengan menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Imam Gunawan.2013:210-216). Berikut akan dijelaskan dibawah ini, yaitu :

1) Reduksi Data

Proses memilah atau menganalisis data, dengan memilah mana data yang dianggap penting dan mana data yang tidak penting untuk menghasilkan data yang relevan dengan yang di teliti sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2) Penyajian Data

Setelah data di reduksi dan sudah di reduksi selanjutnya data di sajikan dalam bentuk naratif sehingga tersusun jelas dan mudah di pahami dalam penarikan kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam menganalisis data yaitu dengan menyimpulkan hasil penelitian dan melihat persamaan, perbedaan serta hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Camat Kuranji Kota Padang (jln.By Pass Simpang Taruko KM 9,5 Padang). Alasan penulis memilih Kecamatan Kuranji karena keterbatasan kemampuan, biaya dan waktu peneliti dalam mendapatkan data dan informasi terkait Pengelolaan DTKS.

III RESULTS AND DISCUSSION

A. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Kuranji Kota Padang

Kecamatan Kuranji Kota Padang, melalui Seksi Kesejahteraan Sosial melakukan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai bentuk koordinasi dan keseimbangan data dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Kementerian Sosial hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi acuan dalam penetapan program bantuan sosial di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Tabel 3 Jumlah DTKS Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2023

No	Kelurahan	Jumlah (Jiwa)
1	Anduian	307
2	Gunuang Sariak	642
3	Kalumbuk	365
4	Korong Gadang	500
5	Kuranji	1.300
6	Lubuk Lintah	364
7	Pasar Ambacang	552
8	Sungai Sapih	533
9	Ampang	305
Jumlah		4.868

Sumber : Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kuranji Kota Padang

Untuk menganalisis pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di kecamatan Kuranji Kota Padang, peneliti menggunakan pengelolaan yang baik Menurut George R. Terry (2010:16) meliputi : Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

1. Perencanaan (*Planning*)

Analisis peneliti tentang wawancara diatas bahwa para informan sudah bekerja dengan maksimal namun ada beberapa hal yang kurang ditemukan di lapangan tentang perencanaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang bahwa masih ada data masyarakat yang salah – salah, masih ada masyarakat yang mengeluh dengan lambatnya proses perubahan data yang mereka urus dalam memperbaiki data yang tidak sesuai dengan KK nya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Analisis peneliti tentang wawancara diatas bahwa para informan sudah bekerja dengan maksimal namun ada beberapa hal yang kurang, ditemukan di lapangan tentang pengorganisasian dalam mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang bahwa dana operasional petugas PSM yang minim sehingga menyebabkan keterlambatan dalam mengerjakan tugas – tugas mereka.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Analisis peneliti tentang wawancara diatas bahwa para informan sudah bekerja dengan maksimal namun ada beberapa hal yang kurang, ditemukan di lapangan tentang pergerakan petugas di lapangan dalam mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang bahwa dalam bekerja petugas – petugas masih ada yang cuek, saling menjelekkkan sesamanya. Semua itu sangat berpengaruh dalam hasil kerja yang didapat, karena tidak ada *team work* yang solid, tidak kompak maka akan sangat berpengaruh dalam pelayanan kepada masyarakat nantinya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Analisis peneliti tentang wawancara diatas bahwa para informan sudah bekerja dengan maksimal namun ada beberapa hal yang kurang, ditemukan di lapangan tentang pengawasan pejabat publik di kecamatan Kuranji kota Padang dalam mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang bahwa dalam pengawasan ke bawahannya sudah di lakukan dengan baik namun ada beberapa kendala petugas yang selalu mengatakan kami kekurangan petugas dan kurang dana operasional.

B. Kendala – kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan DTKS di Kecamatan Kuranji Kota Padang

1. Perencanaan (*planning*)

Faktor yang berpengaruh terhadap pemutakhiran DTKS kurang berkelanjutan oleh pemerintah Kecamatan Kuranji mengarah pada dua aspek utama yang saling memengaruhi, yakni motivasi Petugas Kecamatan yang kurang untuk memutakhirkan DTKS dan kapasitas petugas yang pas-pasan. Peneliti melihat dilapangan bahwa banyak sekali tuntutan kerja petugas pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang yang

diburu – buru waktu sehingga yang terjadi adalah kurang maksimalnya hasil kerja dari petugas pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Tata kelola pengorganisasian yang kurang baik pada pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang. masih menemukan tidak terbukaannya petugas dalam membrikan informasi kepada masyarakat, data banyak tidak valid, petugas kurang bertanggung jawab dalam bekerja dan tidak mandiri, sehingga harus ada teguran dulu baru dikerjakan. Dapat disimpulkan indikator kemandirian dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: memiliki hasrat untuk bersaing, mampu mengambil keputusan dan menghadapi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri, memiliki rasa tanggungjawab dan saling tolong menolong.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Pergerakan dan Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang Masih Lambat. Pergerakan dalam menetapkan data layak atau tidak layaknya masyarakat dalam menerima bantuan sangat lambat sekali, karena ada pengakuan dari masyarakat bahwa saya sudah melengkapi persyaratan dalam pengurusan namun setiap kami ke kantor camat menanyakan kelanjutan terhadap hasil data penerima bantuan kami, namun petugas tampak sibuk dengan urusan lain dan mengatakan bahwa data sedang di proses, kata – kata sedang di proses selalu menjadi senjata bagi petugas namun kalau dilihat dari waktu kepengurusan seakan – akan disengaja untuk diperlambat.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Kurangnya Pengawasan dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Seorang pemimpin organisasi atau instansi perlu mengetahui secara langsung pelaksanaan tugas yang dilakukan karyawan. Pengetahuan pemimpin yang demikian dapat mengetahui hambatan-hambatan serta kesulitan – kesulitan yang dihadapi karyawan. Yang dimaksud dengan pengawasan langsung *Direct Control* (Sujanto, 1983:41) adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh karyawannya.

C. Cara Mengatasi Kendala – kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan DTKS di Kecamatan Kuranji Kota Padang

Untuk tercapainya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang maka perlu dijalankan pola – pola yang dapat mendukung kesuksesan Kebijakan yang dibuat Pemerintah yaitu :

1. Membuat perencanaan yang Baik

Menetapkan perencanaan sebagai kaidah pelaksanaan saja hanya akan memberikan kekakuan struktural pada suatu organisasi. Jangan lupa bahwa sumber daya terkuat dari organisasi adalah sumber daya manusia yang merupakan seorang insan, bukan robot. Mungkin ini pula yang membuat SDM sering berasumsi bahwa visi, misi, perencanaan, serta strategi lainnya adalah bualan semata yang tidak aplikatif dan memiliki dampak signifikan di lapangan, seperti banyak dari pengakuan petugas di lapangan baik petugas PSM kelurahan, Koordinator PSM kecamatan Kuranji, maupun petugas pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di kecamatan Kuranji kota Padang.

2. Membuat Pengorganisasian yang Baik

Untuk tercapainya pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang tentu perlunya pengorganisasian yang baik, ada beberapa hal yang perlu diterapkan menurut peneliti yaitu :

- a) Niat dan Komitmen
- b) Organisasi memiliki visi, misi yang jelas
- c) Patuh pada aturan organisasi tersebut
- d) Bekerja sesuai jobdesk
- e) Disiplin
- f) Bertanggung Jawab
- g) *Fastresponse*/mudah dihubungi
- h) Profesional dalam bekerja
- i) Jujur
- j) Saling terbuka sesama anggota

3. Pergerakan yang baik dalam bekerja

Penggerakan dapat berjalan dengan lancar dan baik maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan atau pekerjaan, yaitu diperlukan adanya kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan yang efektif membawa pengaruh positif terhadap motivasi kerja, kepuasan kerja, dan juga untuk kerja (Silalahi, 1996: 302). Dalam masalah pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang dibutuhkan seorang Camat yang handal dan peka terhadap kebutuhan anak buahnya dan juga peka dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya.

4. Pengawasan yang baik

Pengawasan diperlukan untuk mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai, dan dari aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan kegiatan koreksi dan perbaikan terhadap tujuan-tujuan dan aturan-aturan yang diketahui

menyimpang. Lemahnya sistem pengawasan akan mendorong terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait atau masyarakat secara umum. Dalam kasus pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kecamatan Kuranji kota Padang tentunya diharapkan adanya pengawasan yang baik agar terlaksananya program pemerintah dengan baik dan juga memberikan kepuasan terhadap masyarakat banyak tentunya.

IV CONCLUSION

Kesimpulan adalah hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyaluran bantuan sosial pada Kecamatan Kuranji Kota Padang, sesuai dengan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini ialah:

1. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Kuranji Kota Padang sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal karena masih ditemukan masalah data mulai dari NIK, nama, alamat yang tidak sinkron dan data belum terupdate, hal tersebut karena pengelola data DTKS Di Kecamatan Kuranji Kota Padang dikelola oleh satu orang, sehingga pelaksanaan perbaikan data tidak efektif.
2. Kendala yang menghambat efektifitas pelaksanaan Pengolahan DTKS di Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah adanya petugas yang kurang professional dalam melaksanakan tanggung jawab kerja yang diterimanya, dan masih ada masyarakat yang tidak tertib administrasi.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang menghambat pelaksanaan pengolahan DTKS di Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah dengan menempatkan ASN sesuai dengan keahliannya dan memberikan pelatihan rutin kepada ASN dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan dalam mensosialisasikan pentingnya tertib administrasi guna dalam memverifikasi DTKS sehingga bantuan tersalur kepada masyarakat

tepat sasaran.

A. Saran

Adapun saran dan masukan yang peneliti berikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah atau pemimpin kecamatan Kuranji kota Padang agar menambah staf bagian pengelolaan data DTKS atau ditambah supervisornya, hal tersebut karena banyaknya data yang harus diperbaiki, jika dikelola satu orang pengelola tentu tidak akan optimal, secara kesanggupan mungkin bisa diselesaikan oleh satu orang saja, namun akan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan ini akan menjadi faktor penghambat dalam pemuktahiran data.
2. Bagi karyawan dan masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, karena pekerjaan merupakan amanah yang harus diselesaikan dengan baik sehingga dapat memuaskan hati masyarakat. Dapat menunjukkan sikap yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena ASN merupakan pelayan masyarakat. disiplin dalam bekerja dan bisa menggunakan waktu dengan melakukan hal – hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kepada masyarakat diharapkan dapat mengikuti aturan yang ada, dan bisa mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.

Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan pengetahuan dan referensi dalam melanjutkan penelitian tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Bibliography

- [1]Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*. Jakarta : Rineka Cipta.
- [2]Anggara Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [3]Harsolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Makasar : CV.Alfabeta.
- [4]Hidayat, Syah. 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru : Suska Pers.
- [5]Herdiansyah. 2011. *Metode Penetitian Kualitatif Untuk Ilmu – Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- [6]R.Terry, George.2021. *Dasar – Dasar Manajemen, Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara
- [7]Raco J.r. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- [8]Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- [9]Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo
- [10]Dolet Dominikus Unaradjan. 2019. *Metode Penelitian Kuanlitatif*. Jakarta: Cipinang Muara.
- [11]Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2020. *Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial.
- [12]Mirza Said Pahlevi dkk. 2020. *Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- [13]Astuti Dwi. 2021. *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian masyarakat*. Jurnal ensiklopedia.